



Salam Redaksi

Di tengah situasi kebangsaan yang ditandai fragmentasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan krisis kepercayaan publik, Bulletin Ideologi Edisi 9 menghadirkan sebuah tawaran arah yang jernih dan berakar: Indonesia Madani. Gagasan ini menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup bertumpu pada angka dan prosedur teknokratis, tetapi harus berpijak pada nilai, keadilan, dan visi peradaban. Tanpa fondasi moral dan etika publik, pertumbuhan justru berisiko rapuh dan kehilangan makna.

Tulisan Suharna Surapranata dalam edisi ini mengajak kita melihat Indonesia Madani bukan sebagai slogan, melainkan sebagai kerangka ideologis dan peta jalan kebangsaan: adil dalam sistem dan hukum, sejahtera dalam kehidupan rakyat, serta bermartabat dalam pergaulan dunia. Inilah ikhtiar membangun manusia seutuhnya—lahir dan batin—sekaligus meneguhkan cita-cita nasional NKRI dalam lanskap tantangan global yang kian kompleks.

Selamat membaca.
Semoga berkah.



MPP PKS

eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsep Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



Indonesia Madani: Jalan Ideologis Menuju Bangsa yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat

Suharna Supranata
Wakil Ketua Majelis Syura PKS

Di tengah fragmentasi sosial, ketimpangan ekonomi, krisis kepercayaan publik, serta tekanan geopolitik global yang kian kompleks, Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang tidak sekadar teknokratis, tetapi berakar kuat pada nilai, etika, dan visi peradaban.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan angka tanpa fondasi moral dan keadilan sosial terbukti rapuh, mudah memicu konflik, dan gagal menghadirkan kesejahteraan yang bermakna.

Dalam konteks inilah gagasan Indonesia Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat menjadi relevan sekaligus mendesak.

Indonesia Madani bukan sekadar slogan normatif. Ia adalah visi ideologis sekaligus kerangka kebijakan yang memadukan nilai keimanan, keadilan sosial, demokrasi, pluralitas, dan kedaulatan negara dalam satu kesatuan yang utuh. Visi PLATFORM pembangunan PKS ini berangkat dari pemahaman bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan manusia seutuhnya—lahir dan batin, individu dan kolektif, material dan spiritual.

Masyarakat Madani sebagai Fondasi Peradaban

Konsep Masyarakat Madani (religious based civil society) memiliki akar historis dan normatif yang kuat dalam pengalaman peradaban Islam awal. Piagam Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW sering disebut sebagai salah satu konstitusi

tertua dan paling modern dalam sejarah umat manusia. Ia menegaskan prinsip supremasi hukum, penghormatan terhadap pluralitas, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif menjaga kedaulatan komunitas.

Dalam konteks Indonesia, Masyarakat Madani menemukan relevansinya karena selaras dengan karakter kebangsaan yang majemuk. Indonesia bukan negara homogen, melainkan rumah bersama bagi beragam suku, agama, budaya, dan pandangan hidup.

Karena itu, Indonesia Madani menolak pendekatan ekstrem—baik ekstrem sekular yang mengosongkan nilai moral, maupun ekstrem ideologis yang menafikan kebinekaan. Indonesia Madani justru meneguhkan jalan tengah: masyarakat beriman yang demokratis, religius namun terbuka, berdaulat namun inklusif.

Masyarakat Madani menempatkan negara bukan sebagai alat dominasi, melainkan sebagai institusi pengelola amanah publik. Negara hadir untuk menjamin keadilan, melindungi yang lemah, dan memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang.

Inilah fondasi peradaban yang berkelanjutan, sesuai dengan Cita-cita Nasional NKRI.



Keadilan sebagai Prinsip Dasar Pembangunan

Dimensi adil dalam Indonesia Madani bukan sekadar jargon moral, tetapi prinsip operasional dalam seluruh sektor kehidupan. Keadilan dimaknai sebagai penempatan segala sesuatu secara proporsional dan seimbang, terhindar dari sikap berlebihan (ifrath) maupun pengurangan hak (tafrith). Dalam pembangunan politik, keadilan berarti sistem demokrasi yang tidak dikuasai oligarki dan tidak meminggirkan rakyat. Dalam ekonomi, keadilan menuntut distribusi sumber daya yang lebih merata, kesempatan usaha yang setara, serta keberpihakan kepada kelompok rentan.

Ketimpangan ekonomi yang tinggi bukan hanya persoalan statistik, tetapi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keutuhan bangsa. Ketika sebagian kecil elite menguasai sumber daya secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, maka keadilan sosial



Kita mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

kehilangan maknanya. Indonesia Madani menolak logika pertumbuhan yang timpang dan menegaskan bahwa keadilan adalah prasyarat kesejahteraan, bukan sekadar akibatnya.

Dalam bidang hukum, keadilan menuntut supremasi hukum yang sesungguhnya—hukum yang tajam ke atas dan melindungi ke bawah. Tanpa keadilan hukum, kepercayaan publik runtuh dan negara kehilangan legitimasi moralnya.

Sejahtera: Aman dan Makmur bagi Seluruh Rakyat

Kesejahteraan dalam Indonesia Madani dimaknai secara substantif sebagai kondisi aman dan makmur. Aman berarti terbebas dari rasa takut—takut kehilangan pekerjaan, takut akan kekerasan, takut terhadap ketidakpastian hukum. Makmur berarti terbebas dari rasa lapar dan kemiskinan struktural.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bukan semata soal bantuan sosial atau subsidi temporer, melainkan hasil dari sistem ekonomi yang adil dan produktif. Negara berkewajiban menciptakan iklim yang memungkinkan rakyat bekerja dengan layak, berusaha dengan adil, dan menikmati hasil pembangunan secara merata.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian—krisis pangan, energi, dan perubahan iklim—konsep sejahtera juga menuntut kemandirian nasional. Ketahanan pangan, energi, dan industri strategis menjadi bagian tak terpisahkan dari visi Indonesia Madani.

Martabat Bangsa di Panggung Dunia

Dimensi bermartabat menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang percaya diri, berdaulat, dan dihormati dalam pergaulan internasional. Martabat tidak lahir dari retorika, melainkan dari kualitas sumber daya manusia, akhlak publik, etos kerja, serta produktivitas nasional.

Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tidak mudah didikte oleh kekuatan asing, namun juga tidak terisolasi dari dunia. Ia berdiri sama tegak dan duduk sama tinggi dengan bangsa lain, menjalin kerja sama berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati.

Martabat juga lahir dari budaya dan kreativitas. Ketika bangsa mampu menghasilkan karya-karya unggul—dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan—maka rasa bangga nasional tumbuh secara alami, diikuti penghormatan dari dunia internasional.

Penutup

Indonesia Madani yang Adil demokrasi dan hukumnya, Sejahtera ekonomi rakyatnya, dan Bermartabat budaya bangsanya adalah VISI PERJUANGAN sekaligus peta jalan peradaban. Ia menawarkan arah pembangunan yang utuh: berakar pada nilai keimanan, berpijak pada keadilan sosial, berorientasi pada kesejahteraan nyata, dan bermuara pada martabat bangsa.

Di tengah krisis multidimensi yang kita hadapi, visi ini bukan kemewahan ideologis, melainkan kebutuhan historis. Indonesia membutuhkan pembangunan yang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun manusia dan peradaban. Indonesia Madani adalah ikhtiar kolektif untuk mewujudkan cita-cita tersebut—bagi hari ini dan generasi yang akan datang, sesuai dengan Cita-cita Nasional NKRI.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan angka tanpa fondasi moral dan keadilan sosial terbukti rapuh, mudah memicu konflik, dan gagal menghadirkan kesejahteraan yang bermakna.

Dalam konteks inilah gagasan Indonesia Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat menjadi relevan sekaligus mendesak.





KABAR MPP



SKDP MPP PKS DI BEKASI MPW PKS JABAR BAKAL GELAR PENDIDIKAN POLITIK GELOMBANG 2

Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat menyatakan bakal menggelar kegiatan pendidikan politik konsepsi dasar partai bagi para kader secara berkala.

Hal itu ditegaskan Ketua MPW PKS Jawa Barat **Ridwan Sholihin** usai penyelenggaraan pendidikan politik dan konsepsi dasar partai di Islamic Center Bekasi, Ahad (1/2/2026).

"Nanti kita akan buat lagi untuk gelombang 2 kegiatan pendidikan politik dan konsepsi dasar partai bagi kader-kader PKS se-Jawa Barat," ungkapnya.

Kegiatan pendidikan politik dan konsepsi dasar partai yang digelar MPW PKS Jawa Barat pada batch I digelar di Islamic Center Bekasi.

Materi dalam pendidikan politik ini sangat beragam. Mulai dari AD/ART, falsafah perjuangan partai, garis besar partai, platform kebijakan pembangunan, wawasan kewaspadaan, pengamanan partai hingga pengarusutamaan keluarga.

Para narasumber yang memberikan materi berasal dari MPP PKS dan MPW PKS Jabar. Antara lain, **Mulyanto, Hermanto, Abdul Hakim, Syamsu Hilal, Sapto Waluyo** dan **Sri Utami**. Kegiatan berlangsung satu hari.

Salah satu materi penting disampaikan Ketua MPP DPP PKS, Dr. Mulyanto, yakni Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan Partai (FDPPP).

Mulyanto menekankan pentingnya penguatan pemahaman kader terhadap regulasi serta nilai dasar partai.

"Penting untuk memperkuat pemahaman kader terhadap regulasi dan nilai dasar partai," ungkapnya.